

**MANAJEMEN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SEA TUMPENGAN KECAMATAN
PINELENG KAB. MINAHASA**

ANGGI PRATAMA LANTANG

FEMMY. M. G. TULUSAN

ALDEN LALOMA

aplantang14@gmail.com

Abstract : National and regional development is an inseparable part of village development activities, considering that the concentration of the population is still dominant in rural areas, so that the village is the basis of socio-economic and political power that needs serious attention from the government. The main goal of development carried out by the government is to improve the standard of living of its people. Various businesses from various sectors continue to be developed in an effort to achieve these goals. In Law number 6 of 2014 concerning Villages it is stated that village development is an effort to improve the quality of life and life for the greatest welfare of the village community. Therefore, community participation in development is very important, without community participation, development only makes the community as an object. In the implementation of community empowerment programs, the criteria used to measure participatory management are described by George E. Terry which includes planning, organizing, mobilizing, and supervising.

Keywords: Participatory Management, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa, mengingat konsentrasi jumlah penduduk masih dominan berada di wilayah pedesaan, sehingga desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini lebih bersifat “*top down*” dibandingkan “*bottom-up*”, sehingga telah menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan semata, bukan sebagai subjek pembangunan.

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun sekarang ini pembangunan di tingkat desa masih jauh dari harapan karena lambannya pembangunan yang terjadi di tingkat desa tersebut. Kondisi ini terjadi bisa saja karena jauhnya jangkauan

menuju desa tersebut ataupun sulitnya akses menuju desa tersebut.

Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangatlah penting, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata, yang dimana masyarakat masih berpikir tidak memiliki dan bahkan tidak peduli dengan pembangunan yang ada. Maka dari itu masyarakat harus berpartisipasi dan berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan atau mengkoordinir semua pelaksanaannya.

Manajemen partisipasi mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

pengkoordinasian sampai pada pengendalian / pengawasan (controlling). Desa Sea Tumpengan merupakan bagian dari Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa yang dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya menggunakan dana yang bersumber dari APBN melalui program dana Desa dimana dana tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan pemerataan pembangunan, serta tahap pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memudahkan pemerintah desa untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Pembangunan di Desa Sea Tumpengan membutuhkan perencanaan yang terstruktur dan sistematis dari pemerintah dan juga dibutuhkan peran dari masyarakat itu sendiri yang berupa ide, gagasan, dan saran/masukkan maupun dalam bentuk tenaga, maka pembangunan yang ada akan berjalan dengan baik.

Setelah melakukan observasi awal penulis menemukan permasalahan, yang dimana perencanaan yang tidak ada keterlibatan masyarakat dalam menghadiri musyawarah trersama yang diselenggarakan aparat pemerintah guna untuk masyarakat mengetahui semua proses perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya, dilihat dari setiap pertemuan di balai desa untuk membahas semua pembangunan program didesa tersebut hanya sebagian masyarakat atau bahkan hanya aparat pemerintah saja yang menghadiri serta memberikan tanggapan atau masukan untuk perencanaan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan Desa tidak berjalan efektif dan ini dapat dilihat dari cara pengorganisasian masyarakat oleh pemerintah Desa dimana banyak masyarakat yang tidak menghadiri rapat akibat kurangnya koordinasi, komunikasi serta sosialisasi antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga

mengakibatkan pembangunan yang tidak efektif atau tepat sasaran dan hal tersebut sangat berpengaruh sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan serta pengontrolan kegiatan oleh masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Manajemen Partisipatif Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa?

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Daniel A. Sangian, Salmin Dengo, Jericho D. Pombengi dengan judul Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa dapat berjalan efektif, maka pemerintah desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa (seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, dan lainnya).

Penelitian terdahulu selanjutnya disusun oleh Allen Ngongare, Welson. Y. Rompas, Burhanuddin Kiyai dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupetan Halmahera Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana informsi yang di ambil dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Masyarakat Desa dan BPD untuk pengumpulan data yang di pakai yaitu wawancara, observasi atau dokumentasi dan teknis analisa data menggunakan kategori data ,reduksi data, interprtasi data beserta kesimpulan. Yang harus di ketahui masyarakat Desa Hatetabako Kecamatan

Wasile Tengah perlu merubah paradigma dan lebih menyadari bahwa begitu pentingnya partisipasi dalam setiap proses pembangunan desa guna keberhasilan pembangunan.

Penelitian terdahulu selanjutnya disusun oleh Alfriyanto Tobade, Gustaaf Buddy Tampi, Joorie. M. Ruru di Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso dengan judul Partisipasi Masyarakat Pada Pengawasan Pembangunan Di Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso. Penelitian ini bertujuan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pembangunan Desa Taripa Kecamatan Pamona Timur, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Hasil yang diteliti adalah partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan di bilang bagus dan berjalan dengan baik walaupun masi ada masyarakat yang tidak mengambil peran dalam merencanakan dan mengawasi pembangunan yang ada.pengawasan yang dilakukan masyarakat di Desa Taripa sudah mengalami peningkatan dimana sebagian besar pembangunan yang dilakukan berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya

Penelitian terdahulu selanjutnya disusun oleh Tesyalom Sembel, Ronny Gosal, Sofia Pangemanan di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan judul penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan menggunakan metode kualitatif, dimana informan penelitian adalah kepala desa dan perangkatnya, badan permusyawaratan desa, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta sebagian masyarakat.

Tinjauan Tentang Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu juga, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* berasal dari kata *manage*

menurut kamus Oxford yang artinya memimpin atau membuat keputusan di dalam suatu organisasi. Istilah manajemen yang diterjemahkan dari kata *manage* memang biasanya dikaitkan dengan suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang di dalam organisasi atau lembaga tertentu demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. G.R Terry (Hasibuan, 2009 : 2) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahannya dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman (Safroni, 2012: 44) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli. Menurut George R. Terry (Hasibuan, 2009 : 38) fungsi-fungsi manajemen meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*) dan Pengendalian (*controlling*).

Konsep Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000:419). Menurut pendapat Koetjaraningrat (2003), partisipasi berarti memberikan sumbangan dan turut menentukan arah atau tujuan pembangunan, di mana ditekankan bahwa

pembangunan adalah hak dan kewajiban bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat telah sekian lama di perbincangkan dan didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya agar masyarakat umum atau sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian 'pengikutsertaan' atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Menurut Budi Supriyanto (2009:344) bahwa partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dan dorongan oleh prakarsa atau swadaya masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian kualitatif. Bogman dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2006) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian kualitatif menurut Nasution (2001) termasuk dalam kategori penelitian non - esperimental; data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian. Penelitian kualitatif memiliki 5 ciri utama, yaitu:

- (1) Mempunyai setting alami sebagai sumber data langsung dan penelitian merupakan instrument utamanya.
- (2) Bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dan

kalaupun ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang.

- (3) Lebih menekankan pada proses kerja. Yaitu seluruh fenomenayang dihadapi di terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari terutama yang berkaitan langsung dengan masalah sosial.
- (4) Cenderung menggunakan pendekatan induktif yaitu abstraksi-abstraksi disusun oleh peneliti atas dasar data yang dikumpul dan dikelompokkan bersama-sama melalui pengumpulan data selama kerja lapangan dilokasi penelitian, dan
- (5) Memberikan titik tekan pada makna, yaitu fokus penelahan tempat secara langsung dari masalah kehidupan.

Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian adalah Manajemen Partisipatif dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Kriteria yang digunakan untuk mengukuhkan manajemen partisipatif tersebut dijelaskan oleh George E. Terry sebagai berikut :

- a. Perencanaan (*Planning*) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) yaitu proses pengelompokkan kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manager.
- c. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana.
- d. Pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai apa yang telah ditetapkan.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data (informan) adalah perangkat

Desa Sea Tumpengan mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kepala – Kepala Dusun serta Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta semua yang terlibat dalam pengelolaan dana Desa Sea Tumpengan. Rincian responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Desa Sea Tumpengan (1 orang)
2. Sekretaris dan Perangkat Desa lainnya (3 orang)
3. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat (3 orang)
4. BPD (3 orang)

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif *atari naturalistic* ialah tidak terlalu meningkatkan jumlah atau banyaknya informan atau stempel responden, tetapi yang lebih penting ialah *content*, relevansi, sumber yang benar - benar dapat memberikan informasi. Oleh karena itu, teknik yang digunakan untuk menentukan sumber data informan ialah teknik *proporsional sampling* atau pengambilan sampel dengan tujuan tertentu (Arikunto. 2002), kegiatan penggalian informasi bergulir menggelinding atau berkembang mengikuti prinsip bola salju (*snowball sampling*) sehingga variasi. Kedalaman dan keterincian data atau informasi dapat di peroleh secara maksimal. Pencarian data/informasi di hentikan pada saat pencapaian kejenuhan (*redumdancy*) karena data/informasi yang diberikan sudah sama atau tidak berubah.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan informan utama. Atas pertimbangan inilah maka dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut (Egon G. Guba, 1985 dalam Nasution. 2001).

1. Wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan terhadap pam informan yang telah di tentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Dalam

wawancara ini digunakan pedoman wawancara sebagai panduan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensinya hasil pendataan.

2. Studi empirik. Studi empirik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder pendukung dan data primer hasil wawancara.
3. Observasi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empiric tentang objek penelitian. Teknik observasi ini dapat mempermudah dalam menielaskan keterkaitan dari fenomena yang diamati

Metode Analisis Data

Adapun langkah-langkah analisis data yang dimaksudkan yaitu terdiri dari: reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya kedalam suatu pola yang lebih jelas (Trompenaar Fons, 1993, dalam Rohidi 2002).
2. Penyajian Data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa Sea Tumpengan merupakan salah astu dari hasil pemekaran, desa Sea Dua yang berkembang menjadi 3 (Tiga) desa pemekaran, yang ada awalnya desa Sea Dua

merupakan satu desa hasil pemekaran desa Sea Raya, laju perkembangan jumlah penduduk yang pesat. Yang berdatangan dari berbagai wilayah lain dengan latar belakang suku, ras, dan agama yang beragam sehubungan dengan perkembangannya pemukiman-pemukiman baru yang dikembangkan oleh pengembang pengembang perumahan dan luasnya wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan pemerintahan pada waktu itu sehingga munculah pemikiran-pemikiran oleh para tokoh-tokoh masyarakat saat itu untuk mendirikan desa baru dengan maksud dan tujuan agar pelayanan pemerintah desa dapat menjangkau masyarakat, sehingga dibentuklah Tim pemekaran desa, setelah Tim pemekaran desa dibentuk dengan melalui berbagai proses Pengkajian dan musyawarah oleh masyarakat desa dan secara resmi Desa Sea Tumpengan terbentuk pada tanggal 8 Maret 2012.

Berikut susunan Organisasi Pemerintah Desa Sea Tumpengan sekarang ini



Deskripsi Hasil Wawancara

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Desa Sea Tumpengan selaku informan 1 yang penulis wawancarai yaitu inisial F. K (Hukum Tua) umur 52 tahun yang ditanya mengenai apakah setiap program yang dilaksanakan sudah melalui proses perencanaan ?

Responden menjawab bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan telah diatur mekanismenya baik melalui peraturan pemerintah pusat, daerah maupun

pemerintahan desa itu sendiri, demikian pula dengan pelaksanaan suatu program itu ada mekanismenya yaitu dimulai dengan tahap perencanaan dimana pada tahapan ini pemerintah desa mengumpulkan berbagai aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa, kemudian bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta perwakilan masyarakat dan pemerintah desa menyusun suatu program sesuai anggaran yang tersedia setelah program tersusun selanjutnya diserahkan ke pelaksana program pemberdayaan masyarakat untuk dilaksanakan. Pada tahap perencanaan ini juga dicantumkan prosedur atau langkah – langkah tindakan yang akan diambil ketika program dilaksanakan sehingga tahapan pelaksanaannya mengikuti apa yang telah ditetapkan.

Menurut salah seorang responden inisial H. J (tokoh masyarakat) selaku responden ke 3 mengatakan bahwa pada tahapan perencanaan masyarakat kurang berpartisipasi atau dengan kata lain kehadiran masyarakat dalam setiap rapat atau musyawarah perencanaan sangat kurang sehingga mereka tidak dapat menyampaikan usulan – usulan yang merupakan aspirasi masyarakat karena berbagai kesibukan dan kerja mereka. Hal ini menurut pendapat saya menjadi faktor penyebab suatu perencanaan tidak efektif atau tidak tepat sasaran.

Berdasarkan wawancara diatas mengenai perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat atau dalam hal ini adalah pembangunan fisik dengan alokasi dana yang turun, dapat disimpulkan bahwa dana yang turun tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat sehingga kadang harus melakukan skala prioritas mana yang lebih penting terlebih dahulu untuk dilakukan dan dalam hal ini, seringkali yang menjadi prioritas adalah pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan setapak dan pembuatan selokan. Hal ini dilakukan karena masyarakat antusias dengan program dan kegiatan yang bersifat fisik.

2. Pengorganisasian

Bapak F. M (Sekretaris Desa Sea Tumpengan) umur 48 tahun selaku informan ke 4. Menanggapi pertanyaan peneliti mengenai apa saja kelembagaan yang sudah dibentuk oleh pemerintah Desa Sea Tumpengan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Informan menjawab bahwa “kita sudah membentuk beberapa lembaga pemberdayaan masyarakat, seperti PKK, Karang taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat lain seperti Lembaga pemberdayaan Masyarakat yang lebih menangani pembangunan fisik seperti LPM. Desa Sea Tumpengan juga bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Dan semuanya berjalan sesuai program kerja dan tupoksi masing-masing.

3. Penggerakan

Responden 6 Bapak E.P (Kasie Pemerintahan) selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dia mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kami senantiasa melibatkan masyarakat setempat dan mereka sangat antusias melakukan pekerjaan apalagi itu menyangkut infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat seperti pembuatan jalan setapak, jalan desa, sarana air bersih, pembuatan selokan, rehabilitasi sekolah dan sebagainya. Akan tetapi hal – hal lain seperti ikut dalam peralihan keterampilan, penyuluhan pertanian atau sosialisasi peraturan pemerintah mereka tidak terlalu antusias.

Mengenai keterbatasan dana yang merupakan salah satu hambatan dalam dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat, maka, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para diantaranya Bapak H. L mengenai keterbatasan dana. Beliau mengatakan bahwa itu disebabkan karena anggaran yang dicairkan tidak sesuai dengan usulan kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya kita harus menentukan skala prioritas atau dengan penentuan mana yang lebih urgen untuk dikerjakan terlebih dahulu.

Selanjutnya, mengenai manfaat nyata yang dirasakan masyarakat terhadap program Pemberdayaan masyarakat di Desa Sea Tumpengan, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari program tersebut yaitu Bapak P. L (anggota masyarakat) sebagai informan ke 8 dikatakan bahwa “program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sea Tumpengan memberi manfaat sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat karena apa yang dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti pembuatan jalan desa yang dulunya berlubang sekarang sudah mempunyai saluran air dan masih banyak program sampai saat ini masih dalam tahap penyelesaiannya

4. Pengawasan

Dalam hal ini pengawasan manajemen serta pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berisi rincian kegiatan dan rincian anggaran yang dibuat oleh pelaksana kegiatan, atau dalam hal ini adalah bidang pemberdayaan masyarakat Desa Sea Tumpengan. Pelaporan ini dibuat perkegiatan yang kemudian disatukan dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan pemberdayaan masyarakat pertahun dengan diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa yang kemudian diserahkan kepada pihak Kecamatan melalui Kasi Pemberdayaan masyarakat yang kemudian disatukan dengan laporan kinerja Kecamatan.

Mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat, kata kepala desa yang diwawancarai peneliti mengatakan bahwa “bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu saya datang kelokasi pelaksanaan kegiatan meninjau jalannya kegiatan serta menanyakan kepada mereka apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan karena jika ada kendala maka kami sebagai pemerintah desa langsung

melaporkan kepada Camat atau Bupati. Hal senada disampaikan oleh informan ke 9 inisial D. L (Perangkat Desa) mengungkapkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa adalah pengawasan langsung karena Kepala Desa Sea Tumpengan langsung turun ke lapangan bukan sekedar mendengarkan laporan dan kebetulan saya sebagai perangkat desa yang selalu mendampingi Kepala Desa jika melakukan monitoring kegiatan dilapangan.

Rangkuman Hasil Penelitian

Berikut ini akan dikemukakan rangkuman hasil penelitian sebagai berikut : Masyarakat Desa Sea Tumpengan telah berkontribusi dalam pembuatan perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sea Tumpengan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan responden 2 bahwa beliau membuat Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat selain berdasarkan kegiatan yang memang sudah ada tahun sebelumnya, juga berdasarkan usulan masyarakat.

Usulan masyarakat ini dapat bersifat formal dan non-formal. Contoh dari usulan masyarakat yang bersifat formal telah dilakukan dengan adanya Musrenbang Desa yang mana merupakan wadah untuk menampung aspirasi dan harapan akan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sedangkan usulan nonformal bisa berupa sharing atau diskusi yang kadang masyarakat ungkapkan secara langsung kepada pihak Pemerintah Desa.

Keterlibatan masyarakat selanjutnya juga ada dalam tahap Pelaksanaan, dimana masyarakat telah mengikuti program dan kegiatan dari Pemberdayaan Masyarakat, meskipun ada beberapa kegiatan yang masyarakat kurang minati seperti pelatihan keterampilan, yang mana tidak berkelanjutan dikarenakan sikap demotivasi masyarakat yang tidak tertarik untuk melanjutkan keahlian yang telah dimiliki.

Sedangkan dalam tahap pengawasan, tidak adanya keterlibatan masyarakat akan program yang telah dilaksanakan, hal ini karena di Desa Sea Tumpengan Pengawasan dilakukan oleh Pihak yang menyelenggarakan dan pihak yang bertanggung jawab saja seperti Kepala Desa dan Pihak Kecamatan Pineleng.

Pembahasan

Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara langsung peneliti dengan informan penelitian di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan yang dibuat oleh Kasi Pemberdayaan masyarakat ini merupakan usulan dan keinginan dari masyarakat baik saat musyawarah formal maupun usulan langsung yang diajukan, meskipun kebanyakan usulan adalah pembangunan fisik yaitu perbaikan sarana dan prasarana maka, usulan untuk kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan, yang pada akhirnya keterampilan yang telah didapat ini tidak diterapkan dan diteruskan oleh masyarakat, sehingga banyak program tidak berjalan secara berkelanjutan.

2. Pengorganisasian

Pihak Pemerintah Desa Sea Tumpengan khususnya kasi pemberdayaan masyarakat dalam pengorganisasian sudah cukup baik. hal ini dapat terlihat dari pembagian tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk di Desa Sea Tumpengan. Kelembagaan itu ada LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang lebih condong hanya ke Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Fisik, seperti pembuatan Drainase, pengaspalan dan Pembuatan jalan setapak. Selain itu untuk pemberdayaan masyarakat non-Fisik, ada PKK yang mencakup beberapa kelompok yang diberdayakan, seperti Pokja (kelompok kerja) dan Kelompok Wanita Tani, lalu selain PKK juga ada Karang Taruna yang berjumlah 35 orang. Masing-masing dari kelembagaan

tersebut bertanggung jawab dan berjalan sesuai dengan tupoksi yang ada.

3. Penggerakan

Dalam dimensi *Actuating*, pihak Pemerintah Desa Sea Tumpengan dalam pelaksanaan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat masih tersandung dengan masalah keterlibatan masyarakat yang tergolong sangat minim partisipasinya dalam hal keterlibatan mereka dalam kegiatan fisik maupun non fisik. Contohnya seperti awalnya masyarakat semangat bahkan terkadang meminta untuk diadakannya sosialisasi atau pelatihan keterampilan, tapi giliran sudah dilaksanakan, masyarakat malah tidak memperhatikan keterampilan dan ilmu yang mereka dapat itu dengan melakukan pekerjaan atau terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, dalam pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat desa ini juga didapat temuan lain oleh peneliti di lapangan, yakni keterbatasan dana yang cair. Berdasarkan wawancara dengan informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keterbatasan dana menjadi penyebab utama rencana-rencana kerja yang telah dibuat kasi PM dan di rencanakan oleh masyarakat tidak dapat terealisasi dengan baik. hal ini dikarenakan dana yang cair tidak sesuai dengan permohonan anggaran.

4. Pengawasan

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Controlling sendiri terdiri dari Pengawasan itu sendiri, Pelaporan, dan Evaluasi yang dilakukan setelah selesai kegiatan. Dalam dimensi ini, pihak pemerintah Desa Sea Tumpengan dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dinilai tidak berjalan dengan baik akan tetapi Pelaporan kegiatan atau LPJ kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dibuat oleh kasi PM yang sudah berjalan cukup baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Bertitik tolak dari hasil Penelitian serta pembahasannya maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam dimensi perencanaan, kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Sea Tumpengan meneruskan program yang sebelumnya telah berjalan dengan baik lalu dilanjutkan tahun berikutnya, perencanaan yang dibuat oleh Kasi PM ini merupakan usulan dan keinginan dari masyarakat baik saat musyawarah formal maupun usulan langsung yang diajukan, meskipun kebanyakan usulan adalah pembangunan fisik daripada non fisik. Adapun usulan untuk kegiatan pelatihan keterampilan dan pembinaan, yang pada akhirnya keterampilan yang telah didapat ini tidak diterapkan dan diteruskan oleh masyarakat, sehingga banyak program tidak berjalan secara berkelanjutan atau tidak efektif.
2. Dalam dimensi pengorganisasian, di Desa Sea Tumpengan sudah ada pembagian tanggung jawab kepada setiap kelembagaan yang telah dibentuk. Dan kelembagaan tersebut berjalan sesuai tupoksinya. Kelembagaan pemberdayaan Masyarakat ini adalah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang mana kedua lembaga ini lebih kearah pembangunan Fisik. Lalu ada PKK Kelurahan yang menaungi POKJA (Kelompok Kerja), dan KWT (kelompok wanita tani). serta terakhir ada Karang taruna, yang lebih memberdayakan Pemuda dalam segala bidang. Baik social, ekonomi, agama dan industry.
3. Demotivasi dan minat masyarakat yang kurang terhadap program non fisik yang dibuat oleh Kasi pemberdayaan masyarakat Desa Sea Tumpengan serta adanya keterbatasan dana yang membuat beberapa program dan kegiatan yang

telah diusulkan warga menjadi tidak teralisasi.

4. Dalam dimensi pengawasan ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam aspek pelaporan telah berjalan baik, namun tidak dengan aspek Evaluasi, karena tidak adanya evaluasi yang dilakukan usai kegiatan dilaksanakan. Padahal, evaluasi berperan penting guna kegiatan mendatang agar berjalan lebih baik dari sebelumnya

.Saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan penelitian tersebut diatas maka dapatlah dikemukakan saran – saran sebagai berikut :

1. Dalam pembuatan rencana kegiatan disarankan kepada pemerintah Desa Sea Tumpengan lebih khusus Kasi Pemberdayaan Masyarakat yang disampaikan baik melalui musyawarah formal maupun usulan langsung.
2. Dalam hal pengorganisasian maka disarankan kepada pemerintah Desa Sea Tumpengan agar terus terus memberdayakan lembaga – lembaga yang sudah ada seperti LPM, PKK, Karang Taruna untuk menjadi pelopor dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat baik yang sifatnya fisik ataupun non fisik agar semua kegiatan yang sudah diprogramkan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan.
3. Untuk mencegah terjadinya kemandekan atau terhentinya suatu kegiatan karena kekurangan dana maka kepada pemerintah Desa Sea Tumpengan disarankan agar dapat memaksimalkan partisipasi masyarakat yang ada dengan cara menghimbau agar masyarakat dapat berpartisipasi baik melalui tenaga, dana maupun sumbangan berupa bahan – bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan atau program.

4. Dalam hal pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan suatu kegiatan maka disarankan kepada pemerintah Desa Sea Tumpengan agar mengikutsertakan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama untuk secara bersama – sama melakukan monitoring pekerjaan sehingga mereka merasa turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan program atau pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung. Alfabet.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta PT. Rineka Cipta.
- Chandra, E. 2003. *Membangun Forum Warga “Implementasi Partisipasi dan Pengamatan Masyarakat Sipil*. Yayasan Ekatiga. Bandung.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Bandung Refika Aditama.
- Handoko, Hani. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jogyakarta : B.P.F.E.
- Hasibuan, M. 2009. *Dasar – Dasar Manajemen*. PT. Masagung, Jakarta.
- Kaho, Yosep Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta PT. Raja Grando Persada.
- Manullang, L. A. 2002. *Teori dan Aplikasi Manajemen Komprehensif Integralistik*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Moleong C. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Mikkelsen, B. 2006. *Metode Penelitian Partisipatoris dan upaya – upaya*

pemberdayaan. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.

Safroni, L. 2012. *Manajemen dan penerapannya*. Jakarta Pustaka Quantum.

Safii, M. 2007. *Strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Daerah, Perspektif Teoritik*. Malang Areros Press.

Sumaryady, I. Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta Citra Utama.

Suryana, A. 2010. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang Universitas Negeri. UM. Press.

Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Perentihan*. Tangerang CV. Media Berlian.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*, Bandung Rafika Aditama.

Terry, G. dan Leslie W. Rue. 2010. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta.
Terry, G. 2010. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Jakarta Bumi Aksara.

Sumber – sumber lain :

Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah